

Simon Sili Sabon dan Widodo

Pusat Penelitian Kebijakan

Badan Penelitian dan Pengembangan dan Perbukuan

Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi

simonsilisabon@yahoo.com

DOI : 10.24832/jk.v15i1.282

ABSTRACT

This study aims to analyze: (i) the teacher education system, (ii) the accreditation status of teacher's colleges and study programs, (iii) the fulfillment of lecturer standards, (iv) the quality of student input, and (v) the quality of student internships. Study approach is a mix of quantitative and qualitative. The study utilizes secondary data from Higher Education Database and National Accreditation Board for Higher Education. Also used is survey data with students in four institutions around Jakarta. The study findings show that the teacher education system has changed for the better, but has not been implemented strictly. Previously, graduates of undergraduate education could immediately become teachers, but after the issuance of Minister of Education and Culture Regulation No 87/2013, a bachelor of education must take Teacher Professional Education first if he wants to become a teacher. Another study finding is that most of the study programs have not been accredited. Some study programs that have been accredited, only get a C grade. Regarding the standard of lecturers, some teacher's colleges have met the minimum standard of having a master's degree for lecturers. The number of lecturers at certain teacher's colleges is excessive so that the workload is less than the standard. The quality of student input is quite good. Most students feel that they have had sufficient experience during their internship. The study recommends that the ministry and teacher's colleges apply Minister of Education and Culture Regulation No 87/2013 to produce professional teachers. The Ministry of Education and Culture must work closely with local governments so that teacher recruitment only accepts the graduates from teacher professional education. Teacher professional education must prioritize quality by only accepting graduates with Bachelor's degree in education. If there is a study program that does not meet the requirements, it should be proposed to have its operational permit terminated.

Key words: *Teacher's College, Accreditation, Lecturer Standards, Quality of student input*

ABSTRAK

Studi ini bertujuan menganalisis: (i) sistem pendidikan keguruan, (ii) status akreditasi lembaga pendidikan keguruan dan program studi, (iii) pemenuhan standar dosen, (iv) mutu input mahasiswa, dan (v) mutu magang mahasiswa. Pendekatan studi menggunakan campuran kuantitatif dan kualitatif. Studi memanfaatkan data sekunder dari Pangkalan Data Pendidikan Tinggi dan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi. Digunakan pula data survei dengan mahasiswa di empat lembaga di sekitar Jakarta. Temuan studi menunjukkan bahwa sistem pendidikan keguruan mengalami perubahan ke arah yang lebih baik, namun belum diimplementasikan secara ketat. Sebelumnya lulusan sarjana pendidikan bisa langsung menjadi guru, namun setelah terbitnya Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 87/2013, seorang sarjana pendidikan harus mengikuti Pendidikan Profesi Guru terlebih dahulu jika ingin menjadi guru. Temuan studi lainnya yaitu sebagian besar program studi belum terakreditasi. program studi yang sudah terakreditasi, sebagian hanya memperoleh nilai C. Terkait standar dosen, sebagian lembaga pendidikan keguruan sudah memenuhi standar minimal berpendidikan pasca sarjana. Jumlah dosen pada lembaga pendidikan keguruan tertentu berlebih sehingga beban kerjanya kurang dari standar. Mutu input mahasiswa sudah cukup baik. Sebagian besar mahasiswa merasa telah mendapat

pengalaman memadai dari magang. Kajian merekomendasikan agar kementerian dan lembaga pendidikan keguruan menerapkan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 87/2013 untuk menghasilkan guru profesional. Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan harus bekerja sama dengan pemerintah daerah agar rekrutmen guru hanya menerima lulusan pendidikan profesi guru. Pendidikan profesi guru harus mengutamakan mutu sehingga hanya menerima lulusan sarjana pendidikan. Jika ada program studi yang tidak memenuhi persyaratan, sebaiknya diusulkan untuk dihentikan ijin operasionalnya.

Kata kunci: Lembaga Pendidikan Guru, Akreditasi, Standar dosen, Mutu input mahasiswa

PENDAHULUAN

Guru merupakan faktor penentu keberhasilan penyelenggaraan pendidikan. Lembaga Pendidikan Tenaga Kependidikan (LPTK) mengemban tugas menyiapkan guru profesional, pendidik generasi bangsa masa depan. Bhakti dan Maryani (2016) mengungkapkan bahwa guru merupakan jabatan profesional yang memberikan layanan ahli dan menuntut persyaratan kemampuan/kompetensi kepribadian, pedagogis, sosial, dan profesional. Hasil Uji Kompetensi Guru (UKG) pada tahun 2015 menunjukkan kompetensi pedagogis guru rendah dan hal ini telah menempatkan LPTK sebagai lembaga yang paling bertanggung jawab dengan rendahnya kompetensi yang dimiliki.

Belakangan ini, jumlah LPTK terus bertambah karena euforia kebijakan sertifikasi guru. Kebijakan tersebut telah membuat profesi guru menjadi sangat menarik. Data jumlah LPTK yang dikutip Sidik (2016) dari Majalah Dikti menyebutkan bahwa jumlah total LPTK tercatat sebanyak 429 lembaga. Jumlah LPTK tersebut terdiri atas 383 LPTK (89,2%) berstatus swasta dan 46 LPTK (10,8%) berstatus negeri. Kajian Sidik mengungkapkan pula bahwa seluruh LPTK memiliki jumlah mahasiswa sebanyak 1.440.000 orang. Apabila dirata-rata, LPTK-LPTK yang merupakan lembaga pencetak guru di Indonesia meluluskan tidak kurang dari 300.000 calon guru setiap tahunnya. Jumlah tersebut sangat besar jika dibandingkan daya serap sekolah terhadap

lulusan LPTK yang sangat terbatas, yaitu hanya sebanyak 40.000 guru per tahun. Dengan begitu, terdapat surplus lulusan LPTK setiap tahunnya mencapai lebih dari 260.000 orang.

Berdasarkan fakta dan data di atas, terlihat bahwa jumlah LPTK yang cukup banyak tersebut sebagian besar merupakan LPTK swasta. Proporsi LPTK swasta hampir mencapai 90%. Lalu adanya surplus lulusan setiap tahun yang dapat mencapai 260.000 orang tentunya sangat berpotensi menimbulkan pengangguran terbuka maupun pengangguran terselubung. Banyak pertanyaan muncul apakah semua LPTK swasta yang ada merupakan LPTK yang berkualitas. Mungkinkah Ditjen Dikti terlalu mudah dalam memberikan ijin pendirian sebuah LPTK baru? Apakah sekolah-sekolah memang sangat mengalami kekurangan guru sehingga dibutuhkan LPTK sebanyak itu?

Untuk itu perlu dilakukan evaluasi terhadap sistem pendidikan keguruan agar dapat menghasilkan lulusan yang berkualitas yang sesuai dengan kebutuhan. Jangan sampai LPTK yang banyak itu hanya menghasilkan lulusan yang menganggur dikarenakan jumlah lulusan terus bertambah namun tidak diimbangi dengan jumlah kebutuhan guru, sebagaimana temuan Muhson dkk. (2012) yang menyatakan bahwa persentase penganggur di kalangan terdidik terus meningkat. Banyaknya lulusan LPTK yang tidak seimbang dengan lowongan pekerjaan telah menyebabkan para lulusan kalah bersaing dan menjadi penganggur. Mereka hanya bisa pasrah dan melakukan pekerjaan apa pun dengan gaji yang rendah. Muhson dkk. juga mengungkapkan fakta bahwa sebagian lulusan LPTK di awal-awal lulus terpaksa bekerja sebagai guru honorer, menjadi pengajar bimbingan belajar atau menjadi pegawai swasta. Dua pekerjaan yang pertama masih linear dengan apa yang didapat ketika belajar di LPTK, namun menjadi pegawai swasta sangat tidak linear. Hal ini menunjukkan bahwa banyak lulusan sekolah menengah salah memilih jurusan ketika masuk perguruan tinggi.

Adi (2016) juga menyampaikan temuannya bahwa para guru honorer terpaksa bekerja meskipun gajinya kecil; mereka menjadi penganggur terselubung dikarenakan jumlah guru sebagai pekerja di sektor pendidikan lebih banyak daripada jumlah kebutuhan. Mengapa guru honorer menjadi penganggur terselubung?

Ini karena umumnya guru honorer bergaji kecil, sebagaimana temuan Widiarto (2020) yang mengungkapkan bahwa rerata gaji guru honorer yang belum bersertifikat pendidik kurang dari Rp 300.000,-/bulan.

Sudarmi, Sarmita dan Nugraha (2020) melakukan penelitian terkait dengan pengangguran lulusan LPTK khususnya program studi Pendidikan Geografi Universitas Pendidikan Ganesha (Undiksha). Mereka melakukan penelusuran terhadap lulusan Undiksha dan hasil penelitiannya menunjukkan bahwa tipe pengangguran yang dialami alumni program studi tersebut dari tahun 2017-2019 meliputi tipe pengangguran terbuka sebesar 6%, setengah menganggur 14,3%, pengangguran terselubung 51% dan pengangguran musiman 6%. Tipe pengangguran yang paling mendominasi adalah setengah menganggur dan pengangguran terselubung. Tipe setengah menganggur disebabkan oleh faktor lowongan kerja terbatas yang persentasenya mencapai 12,9% dan jam kerja yang pendek sebanyak 9,7%, sedangkan penyebab timbulnya tipe pengangguran terselubung adalah faktor minimnya lowongan kerja sebesar 38,7% dan kalah bersaing sebesar 19,3%.

Selama ini masyarakat mendapat gambaran tentang mutu suatu LPTK dari status akreditasinya atau status akreditasi program studi. Akreditasi sendiri menurut undang-undang adalah kegiatan penilaian kelayakan program dalam satuan pendidikan berdasarkan kriteria yang telah ditetapkan. Dalam Permenristekdikti 44/2015 ditetapkan 8 Standar Nasional Pendidikan (SNP) yang harus dipenuhi LPTK yaitu (i) standar kompetensi lulusan, (ii) standar isi pembelajaran, (iii) standar proses pembelajaran, (iv) standar penilaian pembelajaran, (v) standar dosen dan tenaga kependidikan, (vi) standar sarana dan prasarana pembelajaran, (vii) standar pengelolaan pembelajaran, dan (viii) standar pembiayaan pembelajaran. Dengan pertumbuhan LPTK yang begitu menjamur, tentu dipertanyakan apakah seluruh LPTK memenuhi standar yang ditetapkan tersebut. Faktor kalah dalam bersaing menunjukkan bahwa sebagian lulusan LPTK kurang berkualitas.

Oleh karena keterbatasan sumber daya kajian, kajian ini tidak bisa melingkupi kedelapan standar yang disebutkan, melainkan fokus pada dua standar saja yaitu (i) standar dosen

dan tenaga kependidikan dan (ii) standar pengelolaan pembelajaran. Kedua standar ini pun masih dibatasi lagi. Standar dosen dan tenaga kependidikan dibatasi menjadi standar dosen saja, sedangkan standar pengelolaan pembelajaran dibatasi hanya pada pelaksanaan magang saja. Selain itu kajian ini pun membatasi lingkup program studi yang hendak dievaluasi, yaitu hanya Pendidikan Guru Sekolah Dasar (PGSD) dan Pendidikan Profesi Guru (PPG).

BANPT merupakan lembaga pemerintah yang diberi kewenangan untuk melakukan akreditasi terhadap perguruan tinggi termasuk LPTK. Di dalam melakukan akreditasi, BANPT mengembangkan instrumen penilaian. Instrumen tersebut mengukur 4 dimensi penilaian (Peraturan BANPT Nomor 4/2017) yaitu (i) mutu kepemimpinan dan kinerja tata kelola, (ii) mutu dan produktivitas keluaran, (iii) mutu proses, dan (iv) kinerja mutu input yang meliputi sumber daya manusia (dosen dan tenaga kependidikan), mahasiswa, kurikulum, sarana prasarana, keuangan (pembiayaan dan pendanaan), dan kerja sama. Agar sejalan dengan lingkup SNP yang disebutkan terdahulu, dimensi penilaian yang dijadikan fokus kajian adalah dimensi keempat yaitu "kinerja mutu input". Namun dimensi ini pun hanya dibatasi pada mutu dosen, input mahasiswa, dan kurikulum khususnya terkait pelaksanaan magang mahasiswa tingkat akhir. Khusus untuk magang ini dilakukan studi dokumen tentang magang di negara lain untuk melihat adanya praktik baik yang dapat diadopsi dan disesuaikan dengan kondisi setempat.

Dari uraian di atas dirumuskan tujuan umum dari kajian ini yaitu mengevaluasi sistem penyiapan guru untuk mengajar pada jenjang pendidikan dasar guna memberikan masukan dalam pengambilan kebijakan peningkatan mutu LPTK. Untuk mencapai tujuan ini, kajian melakukan analisis terhadap (i) sistem pendidikan keguruan, (ii) status akreditasi LPTK dan program studi khususnya PGSD dan PPG, (iii) pemenuhan standar mutu pendidik/dosen di LPTK, (iv) mutu input calon mahasiswa yang diterima menjadi mahasiswa LPTK, dan (v) mutu magang mahasiswa LPTK khususnya untuk program studi PGSD dan PPG.

Artikel ini selain berkontribusi pada perkembangan ilmu pengetahuan juga akan memberikan masukan yang bermanfaat bagi

Kemendikbud dalam upayanya memperbaharui dan menyempurnakan sistem pendidikan keguruan yang ada saat ini agar LPTK dapat mencetak calon-calon guru yang berkualitas yang sesuai dengan kebutuhan, bukan menciptakan pengangguran. Hasil yang dicapai dari kajian ini adalah adanya rekomendasi kebijakan khususnya untuk perbaikan mutu lulusan LPTK melalui perbaikan mutu input calon mahasiswa LPTK dan mendorong LPTK untuk memenuhi Standar Nasional Pendidikan (SNP) khususnya standar dosen karena faktor utama penentu mutu lulusan adalah dosen, dan upaya peningkatan mutu lulusan melalui pelaksanaan magang.

Achadah (2019) mendefinisikan evaluasi sebagai kegiatan yang terencana untuk mengetahui keadaan suatu objek dengan menggunakan instrumen dan hasilnya dibandingkan dengan tolak ukur untuk memperoleh kesimpulan. Sementara Suarga (2019) mendefinisikan evaluasi merupakan suatu sub sistem yang sangat penting dan sangat dibutuhkan dalam setiap sistem pendidikan, karena dengan evaluasi, maka maju dan mundurnya kualitas pendidikan dapat diketahui, dan dengan evaluasi pula, kita dapat mengetahui titik kelemahan sehingga dapat mencari jalan keluar untuk berubah menjadi lebih baik di masa yang akan datang. Dalam kajian ini evaluasi didefinisikan sebagai suatu kegiatan atau proses yang terencana, sistematis dan berkelanjutan untuk menentukan kualitas (nilai dan arti) daripada sesuatu, berdasarkan pertimbangan dan kriteria tertentu dalam rangka mengambil suatu keputusan.

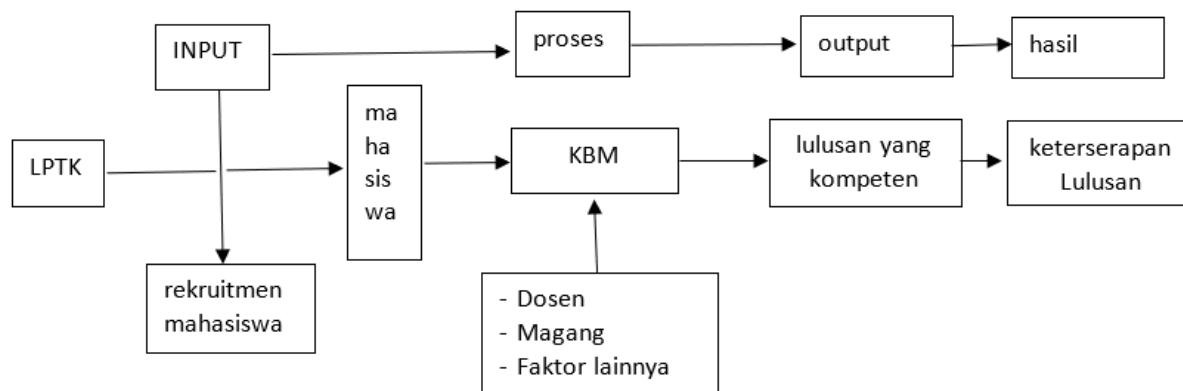
Dalam kajian ini evaluasi dilakukan terhadap suatu sistem/program yaitu pendidikan guru. Untuk itu perlu diketahui tentang evaluasi program. Menurut Munthe (2015), evaluasi program diartikan sebagai proses pencarian informasi, penemuan informasi dan penetapan informasi yang dipaparkan secara sistematis tentang perencanaan, nilai, tujuan, manfaat, efektivitas dan kesesuaian sesuatu dengan kriteria dan tujuan yang telah ditetapkan. Disebutkannya bahwa tujuan evaluasi program adalah untuk memberikan rekomendasi sebagai bahan pertimbangan dalam menentukan keputusan atas program yang dilaksanakan. Sedangkan manfaatnya adalah adanya keputusan yang tepat sesuai dengan hasil evaluasi.

Syahril (2018) berpendapat bahwa pendidikan

guru menentukan kualitas guru. Semakin baik pendidikan guru sebuah sistem, semakin baik kualitas gurunya. Syahril menyampaikan bahwa ketika Sekolah Pendidikan Guru (SPG) dihapus tahun 1989, terjadi pemutusan keahlian dan legasi tradisi pendidikan keguruan yang baik dari zaman Belanda. Selanjutnya untuk menjadi guru haruslah lulusan Institut Keguruan dan Ilmu Pendidikan (IKIP), namun banyak kalangan menyangsikan kualitas lulusan IKIP terutama karena mereka tidak dianggap menguasai ilmu pelajaran yang diampunya. Di akhir tahun 1990-an IKIP diubah menjadi universitas dengan nama umumnya LPTK dengan harapan terjadi penguatan penguasaan konten dari calon-calon guru di IKIP dan hingga sekarang, masalah ini belum terselesaikan.

Samsu (2017) menulis bahwa LPTK yang baik dan profesional adalah LPTK yang memiliki perencanaan (*planning*) yang baik. Perencanaan itu bisa saja dalam bentuk program, ukuran ketercapaian program, ketersediaan sumber daya pengelola LPTK, penentuan sasaran LPTK, kriteria dan indikator sasaran LPTK, pembiayaan, pemanfaatan *output* keluaran LPTK, target ketercapaian, standar capaian kinerja, penyelenggara dan standar kriteria pengelola LPTK, pedoman dan petunjuk teknis pengelolaan, serta sistem evaluasi.

Dalyono dan Agustina (2018) menyebutkan bahwa pendidikan yang bermutu lahir dari dosen yang bermutu. Jadi dosen merupakan faktor utama penentu mutu pendidikan. Shobri (2017) mengelompokkan faktor-faktor yang mempengaruhi mutu pendidikan dalam dua kategori yaitu faktor input pendidikan dan faktor proses manajemen pendidikan. Input pendidikan adalah segala sesuatu yang harus tersedia karena dibutuhkan untuk berlangsungnya proses. Input pendidikan terdiri dari seluruh sumber daya LPTK yang ada. Komponen dan sumber daya LPTK terdiri dari (i) orang (*man*), (ii) dana (*money*), (iii) sarana/prasarana (*material*) serta (iv) peraturan (*policy*). Selanjutnya faktor proses manajemen pendidikan dikelompokkan menjadi dua kategori juga yaitu faktor internal dan eksternal. Faktor internal meliputi: psikologis, sosiologis, dan fisiologis yang ada pada diri peserta didik dan pendidik. Sedangkan yang termasuk dalam faktor eksternal ialah semua faktor yang mempengaruhi proses hasil belajar mengajar selain faktor peserta didik dan dosen.



Grafik 1. Kerangka Berpikir Kajian

Berikut ini disajikan kerangka berpikir kajian. Kajian ini hanya mengevaluasi sebagian dari sistem pendidikan keguruan. Berdasarkan kajian literatur diketahui bahwa banyak lulusan LPTK merupakan pengangguran terselubung. Dugaan awal hal ini disebabkan antara lain karena input mahasiswanya yang kurang berkualitas. Selain itu dengan menjamurnya jumlah LPTK penghasil guru diduga kurang memperhatikan pemenuhan SNP Pendidikan Tinggi khususnya kuantitas dan kualitas dosen sebagai faktor utama penentu mutu lulusan. Selain itu diduga pula bahwa magang yang dilakukan mahasiswa LPTK selama ini kurang mendukung si calon guru siap untuk memasuki dunia kerja. Dari komponen pengelolaan sebuah LPTK untuk menghasilkan guru, kajian ini hanya mengevaluasi komponen input dan sebagian komponen proses yaitu kegiatan perkuliahan yang membutuhkan adanya sumber daya tenaga khususnya dosen yang harus memenuhi SNP yang ditetapkan, kemudian sedikit tentang faktor kurikulum khususnya terkait pelaksanaan magang. Komponen input yang dievaluasi adalah input calon mahasiswa khusus terkait proses rekrutmen awalnya.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode penelitian campuran (*mixed method*) yaitu pendekatan penelitian dengan mengombinasikan bentuk kualitatif dan bentuk kuantitatif. Metode ini digunakan karena ingin menghasilkan fakta yang lebih banyak dalam meneliti masalah yang dihadapi sistem pendidikan keguruan dalam menghasilkan sarjana kependidikan dan menyelenggarakan PPG dalam upaya menghasilkan guru profesional. Populasi kajian

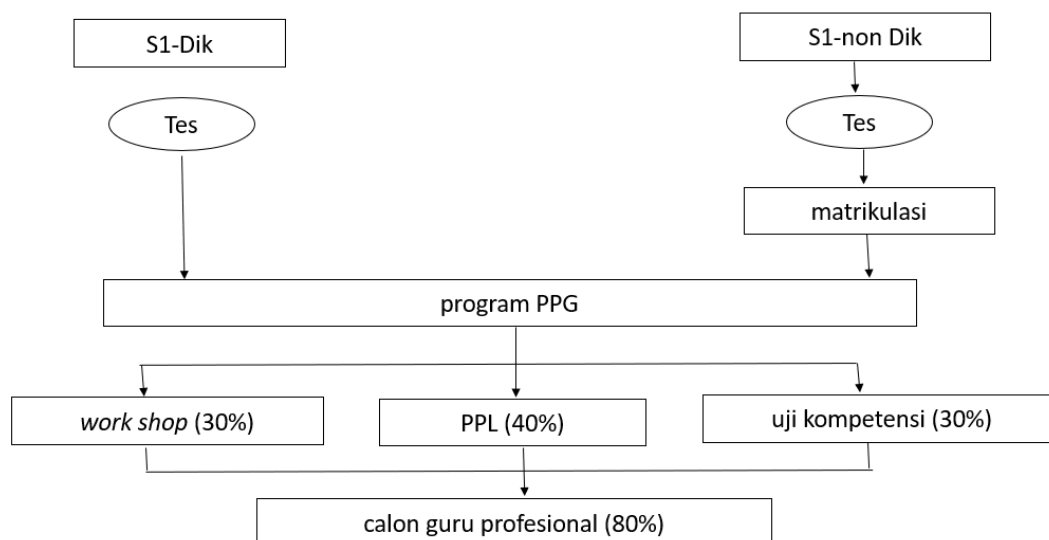
ini adalah seluruh LPTK baik negeri maupun swasta yang menyelenggarakan program studi PGSD dan PPG. Subjek penelitian kajian ini terdiri dari pengelola program studi PGSD, pengelola program studi PPG dan mahasiswa tingkat akhir program studi PGSD dan PPG. Analisis data penelitian menggunakan teknik kuantitatif dan kualitatif. Analisis kuantitatif terutama dilakukan terhadap data sekunder yang diperoleh dari Pangkalan Data Dikti dan data akreditasi LPTK yang diperoleh dari BANPT serta data primer yang diperoleh melalui kuesioner untuk mengetahui persepsi mahasiswa tentang pemenuhan LPTK terhadap Standar Nasional Pendidikan Tinggi yang menjadi fokus kajian. Selain itu data dari kuesioner mahasiswa dianalisis untuk mengetahui bagaimana mutu input mahasiswa ketika masuk LPTK. Selain itu diadakan pula Diskusi Kelompok Terpumpun (DKT) dengan beberapa ketua program studi PGSD dan PPG di wilayah Jabodetabek, untuk mendalami bagaimana LPTK menjangkau calon mahasiswa sehingga diperoleh mahasiswa yang benar-benar mencintai profesi mengajar. Kriteria yang digunakan dalam melakukan evaluasi adalah memanfaatkan kriteria penilaian yang diterapkan BANPT dalam melakukan akreditasi.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Sistem Pendidikan Keguruan Saat ini

Sebelum dilakukan evaluasi perlu diketahui dan dipahami terlebih dahulu mengenai sistem pendidikan keguruan. Pada tahun 2013 Pemerintah menerbitkan Permendikbud 87/2013 tentang PPG, yang diharapkan dapat menciptakan guru-guru profesional untuk

mengajar di berbagai satuan pendidikan. Sejak itu sistem pendidikan keguruan pun berubah seperti terlihat pada Grafik 2 (Pangestika dan Alfariza, 2015). Terlihat dari grafik bahwa untuk menjadi guru profesional seorang calon guru harus terlebih dahulu menamatkan pendidikan sarjana lalu mengikuti program PPG selama 1 tahun untuk mendapat gelar guru profesional yang disingkat dengan “Gr”.



Grafik 2. Sistem Pendidikan Keguruan Indonesia (Permendikbud No 87/2013)

Terlihat jelas dari grafik bahwa seorang tamatan sarjana pendidikan belum bisa menjadi calon guru profesional, apalagi seorang yang bukan sarjana pendidikan. Mereka harus mengikuti pendidikan lanjutan yaitu PPG. Sarjana non kependidikan sendiri masih harus mengikuti program matrikulasi. Sistem pembelajaran pada program studi PPG meliputi *workshop*, Praktik Pengalaman Lapangan (PPL) dan uji kompetensi. Dari ketiga indikator di atas, mahasiswa dinyatakan lulus program PPG apabila mencapai minimal kelulusan (80%). Bagi mahasiswa yang hasil evaluasinya masih di bawah kriteria minimal diberi kesempatan latihan tambahan sampai mencapai nilai minimal.

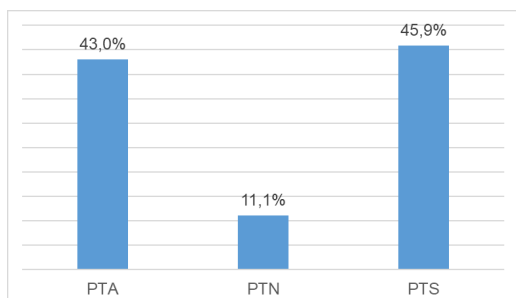
Selama ini guru-guru yang direkrut untuk mengajar di SD adalah mereka yang lulus S1 PGSD, atau D2 PGSD atau guru dengan latar belakang pendidikan lainnya yang direkrut baik oleh kepala sekolah maupun oleh pemerintah daerah melalui dinas pendidikan atau oleh pemerintah Pusat untuk mengajar karena sekolah membutuhkan guru. Pemerintah terus berupaya untuk memperbaiki mutu pendidikan dengan mengadakan perbaikan dalam rekrutmen guru maupun menetapkan kebijakan penerimaan mahasiswa untuk dididik menjadi calon guru. Sayangnya rekrutmen guru selama ini masih sulit dikontrol, sehingga tetap saja

ada lulusan yang direkrut menjadi guru namun belum memiliki sertifikat pendidik, karena belum mengikuti PPG. Seharusnya rekrutmen guru dilakukan sesuai regulasi undang-undang, yaitu hanya menerima lulusan PPG. Dengan demikian sampai dengan tahun 2020 program studi PPG masih terus menerima guru dalam jabatan. Guru dalam jabatan yang mengikuti PPG ini diseleksi langsung oleh Ditjen GTK dari antara guru-guru yang sudah sedang mengajar namun belum memiliki sertifikat pendidik. Jadi program studi PPG sementara ini menerima mahasiswa yang diseleksi oleh Ditjen GTK.

Kualitas LPTK

Berdasarkan data Pangkalan data Dikti tahun 2020 diketahui bahwa LPTK di Indonesia saat ini berjumlah 595 lembaga yang diselenggarakan oleh Pemerintah yaitu Perguruan Tinggi Negeri (PTN), oleh Yayasan Swasta (Perguruan Tinggi Swasta), dan yang diselenggarakan dengan nuansa keagamaan yaitu Perguruan Tinggi Agama (PTA), seperti terlihat pada Grafik 3. Berdasarkan data Pangkalan data Dikti dikalkulasi bahwa jumlah PTA sebanyak 43%, jumlah PTN sebanyak 11,1% dan jumlah PTS sebanyak 45,9%. Seluruh LPTK ini menyelenggarakan sebanyak 603 program studi PGSD; jumlahnya

lebih banyak dari jumlah LPTK, karena terdapat LPTK yang menyelenggarakan program studi PGSD di beberapa lokasi/kampus seperti UPI Bandung memiliki kampus PGSD di Sumedang, Purwakarta, Cibiru dan Serang dan sebagainya.



Grafik 3. Data LPTK (N=595)

Sumber: Pangkalan data Dikti, 2020

Dari grafik terlihat bahwa sebagian besar LPTK penyelenggara PGSD merupakan LPTK swasta. Untuk mendapat gambaran mengenai mutu LPTK dan program studi PGSD selama ini dapat diperoleh melalui informasi tentang status akreditasi dan nilai akreditasi yang diperoleh setelah dilakukan akreditasi oleh Badan Akreditasi Nasional Pendidikan Tinggi (BANPT). BANPT merupakan satuan kerja Pemerintah yang melakukan penilaian terhadap mutu LPTK dan menetapkan akreditasi LPTK.

Dari seluruh LPTK baru 40,3% yang terakreditasi oleh BANPT, belum ada separuh dari jumlah LPTK yang ada. Selanjutnya dari 603 program studi PGSD baru 41,1% yang sudah terakreditasi. Terlihat juga bahwa belum ada separuh program studi PGSD terakreditasi oleh BANPT. Hasil akreditasi BANPT menunjukkan bahwa dari program studi PGSD yang sudah terakreditasi, hanya 11,7% memperoleh nilai akreditasi A, 52,4% memperoleh nilai akreditasi B, dan sebanyak 35,9% memperoleh nilai akreditasi C.

Banyaknya program studi PGSD yang belum terakreditasi BANPT menunjukkan bahwa banyak program studi PGSD diselenggarakan hanya berdasarkan ijin operasional dari Ditjen Dikti. Selanjutnya, sebagian program studi PGSD yang sudah terakreditasi BANPT memperoleh nilai C menunjukkan bahwa banyak LPTK bermutu rendah. Kondisi ini tentunya sangat mempengaruhi mutu lulusan calon guru. Dari sini dapat dipahami mengapa terdapat banyak

lulusan LPTK yang menganggur. Kalaupun mereka direkrut menjadi guru tentunya mereka pun hanya dapat menghasilkan anak-anak dengan prestasi apa adanya.

Sebelumnya sudah diinformasikan bahwa seorang lulusan sarjana harus mengikuti Pendidikan Profesi Guru terlebih dahulu jika ingin menjadi guru. Oleh karena itu, Kemendikbud menetapkan 126 LPTK (21,2%) menyelenggarakan program studi PPG. Berdasarkan data Pangkalan data Dikti LPTK yang ditetapkan pemerintah tersebut menyelenggarakan sebanyak 145 program studi PPG dan baru 24,8% yang diakreditasi BANPT yang semuanya memperoleh nilai akreditasi B. Jadi sebagian besar LPTK yang menyelenggarakan PPG juga beroperasi hanya berdasarkan ijin operasional Ditjen Dikti. Informasi ini semakin menguatkan bahwa banyak LPTK bermutu rendah. Rendahnya mutu LPTK mengimplikasikan bahwa lulusan yang dihasilkan akan bermutu rendah sehingga ketika lulusan ini berhasil direkrut menjadi guru mereka pun hanya bisa menghasilkan anak didik dengan prestasi seadanya.

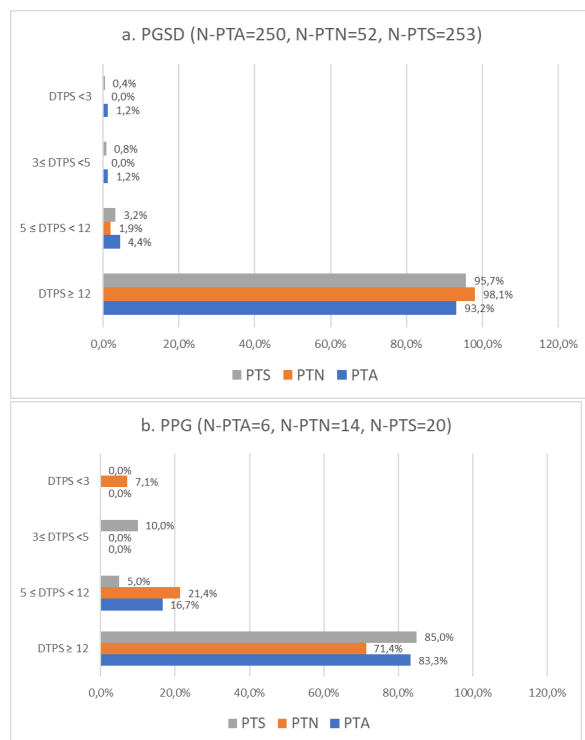
Evaluasi Pemenuhan SNP LPTK untuk Faktor Dosen

Dalam menyelenggarakan suatu program studi, LPTK membutuhkan dosen yang minimal berlatar belakang pendidikan pascasarjana. Selain itu LPTK harus memiliki mahasiswa, di samping sumber daya lainnya seperti kurikulum, kemudian sarana prasarana yang tersedia dalam jumlah yang memadai. Sebuah LPTK harus memiliki dosen yang memadai untuk dapat menyelenggarakan suatu program studi. Untuk mengetahui kecukupan dosen bagi LPTK untuk menyelenggarakan suatu program studi diterapkan indikator mutu berikut yang digunakan BANPT dalam melakukan akreditasi.

Indikator mutu pertama adalah kecukupan Dosen Tetap program Studi (DTPS). Kriteria yang diterapkan dalam melakukan penilaian terhadap indikator kecukupan DTPS ini adalah:

- $DTPS \geq 12$ sangat memadai
- $5 \leq DTPS < 12$ dianggap masih cukup memadai
- $3 \leq DTPS < 5$ dianggap kurang memadai
- $DTPS < 3$ dianggap tidak memadai

Dengan menerapkan kriteria ini diperoleh hasil penilaian kepemilikan DTSP sebagaimana disajikan dalam grafik 4.



Grafik 4. Kecukupan DTSP

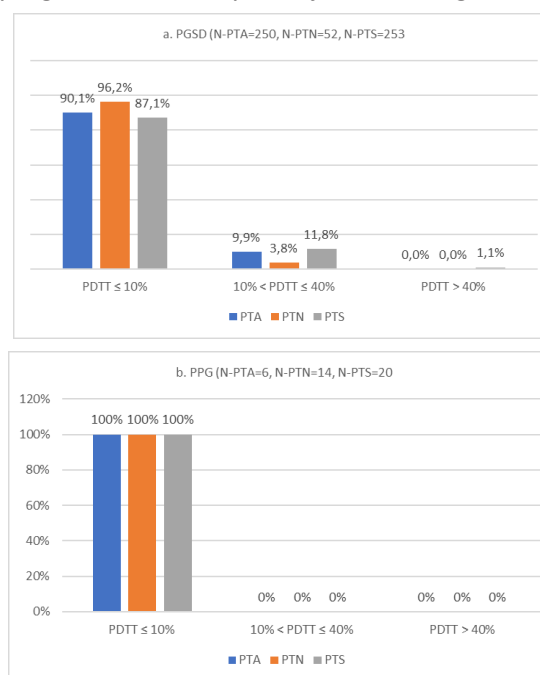
Dari Grafik 4-a terlihat bahwa sebagian besar LPTK penyelenggara PGSD sudah memiliki DTSP yang memadai. Terlihat bahwa PTN yang paling banyak memiliki jumlah DTSP yang memadai, yaitu sebesar 98,1%, diikuti PTS dengan 95,7% dan PTA dengan 93,2%. Pada grafik 4-b terlihat pula bahwa sebagian besar LPTK penyelenggara PPG sudah memiliki DTSP yang memadai, namun dengan persentase yang lebih rendah daripada di program studi PGSD. Terlihat bahwa PTS yang paling banyak memiliki DTSP memadai yaitu dengan 85%, diikuti PTA dengan 83,3%, kemudian PTN dengan 71,4%. Terlihat pula bahwa ada sejumlah kecil LPTK yang jumlah DTSP tidak memadai untuk menyelenggarakan PGSD dan PPG. LPTK seperti ini harus segera diberi suatu periode waktu untuk memenuhi standar yang ditetapkan jika ingin tetap mengoperasikan program studi tersebut. Karena jika tetap dibiarkan beroperasi, kualitas lulusan calon guru yang dihasilkannya sudah pasti berkualitas rendah.

Indikator mutu kedua adalah kepemilikan Dosen Tidak Tetap (DTT). LPTK sebaiknya memang tidak atau seminim mungkin memiliki DTT. Dalam

melakukan akreditasi, BAN-PT menerapkan kriteria kepemilikan DTT sebagai berikut. Dari kriteria ini BAN-PT menetapkan semacam standar agar persentase DTT (PDTT) dari total dosen tidak melebihi 10%. Berikut kriteria yang digunakan dalam menilai indikator ini:

- PDTT ≤ 10%, dianggap ideal
- 10% < PDTT ≤ 40%, masih dianggap cukup ideal
- PDTT > 40%, dianggap tidak ideal

Dengan memanfaatkan data dari Pangkalan data Dikti, dikalkulasi kepemilikan DTT di seluruh LPTK yang ada dan hasilnya disajikan dalam grafik 5.



Grafik 5. Kepemilikan Dosen Tidak Tetap

Dari grafik 5-a terlihat bahwa sebagian besar program studi PGSD memenuhi standar kepemilikan DTT yaitu persentasenya kurang dari atau sama dengan 10%. PTN terlihat paling banyak memenuhi standar kepemilikan DTT ini yaitu dengan 96,2% diikuti PTA dengan 90,1% dan PTS dengan 87,1%. Untuk program studi PPG (Grafik 5-b), terlihat bahwa seluruh LPTK memenuhi standar kepemilikan DTT yang ditetapkan. Terlihat masih ada sejumlah kecil program studi PGSD yang memiliki DTT dengan persentase berkisar dari 10-40%, bahkan ada yang memiliki DTT dengan persentase lebih besar dari 40%. Sebaiknya LPTK yang memiliki DTT dengan persentase lebih besar dari

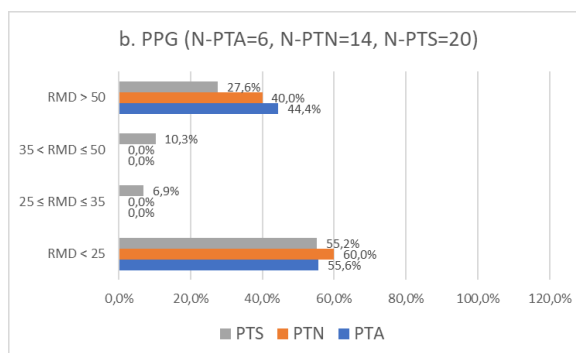
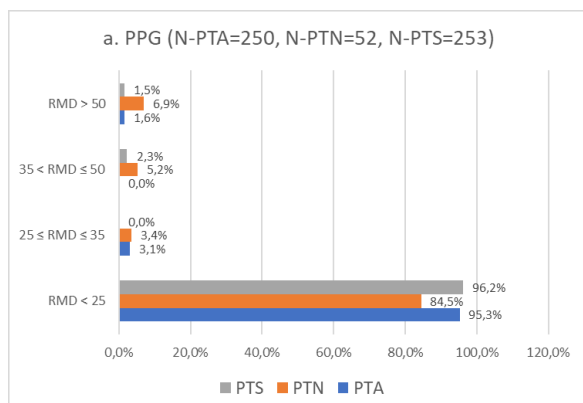
10% diberikan peringatan untuk secepatnya mengurangi DTT. Karena jika dibiarkan tetap beroperasi, kualitas lulusan calon guru yang dihasilkan akan berkualitas rendah.

Indikator mutu ketiga adalah Rasio Mahasiswa Dosen (RMD) yaitu rasio jumlah mahasiswa program studi terhadap dosen tetap program studi. Dari indikator ini terlihat pentingnya mahasiswa sebagai input di LPTK. Tentunya LPTK bisa beroperasi karena memiliki mahasiswa dalam jumlah yang memadai. RMD ideal yang ditetapkan BANPT adalah $25 \leq RMD \leq 35$. Berikut ini disajikan kriteria yang diterapkan BANPT dalam melakukan akreditasi dan kajian ini menggunakannya dalam menilai indikator mutu ini.

- RMD < 25, dianggap kurang efisien
- $25 \leq RMD \leq 35$, dianggap paling efektif dan efisien
- $35 < RMD \leq 50$, dianggap kurang efektif
- RMD > 50, dianggap tidak efektif

Berdasarkan data Pangkalan data Dikti dilakukan kalkulasi RMD dari seluruh program studi PGSD dan PPG. Hasilnya disajikan dalam grafik 6.

Dari grafik 6-a terlihat bahwa umumnya program studi PGSD memiliki RMD kurang dari 25. Terlihat bahwa 96,2% PTS memiliki RMD<25, kemudian 95,3% PTA memiliki RMD<25, dan 84,5% PTN memiliki RMD<25. RMD ini kurang efisien karena menunjukkan bahwa LPTK kelebihan dosen. Terlihat bahwa hanya sebagian kecil program studi PGSD yang memiliki RMD ideal yaitu $25 \leq RMD \leq 35$. Tercatat tidak ada program studi PGSD di PTS yang memiliki RMD ideal, kemudian tercatat 3,1% program studi PGSD di PTA memiliki RMD ideal, dan hanya 3,4% PTN memiliki RMD ideal. Angka ini menunjukkan bahwa RMD PGSD memang jauh dari ideal.



Grafik 6. Rasio Mahasiswa terhadap Dosen Tetap

Sangat disayangkan juga bahwa terdapat 6,9% program studi PGSD di PTN yang memiliki RMD jauh dari ideal yaitu lebih besar dari 50.

Untuk program studi PPG, RMD juga terlihat cukup bermasalah karena jauh dari ideal. Terlihat pada grafik 6-b bahwa tidak ada program studi PPG di PTA dan PTN yang memiliki RMD ideal, dan hanya 6,9% program studi PPG di PTS yang memiliki RMD ideal. Sama seperti pada program studi PGSD, tercatat lebih dari separuh program studi PPG baik di PTA, PTN dan PTS yang memiliki RMD kurang dari 25. RMD ini kurang efisien karena menunjukkan bahwa LPTK kelebihan dosen. Terlihat dari grafik bahwa cukup banyak program studi PPG memiliki RMD jauh dari ideal yaitu lebih besar dari 50. Tercatat 44,4% program studi PPG di PTA memiliki RMD jauh dari ideal, kemudian 40% program studi PPG di PTN memiliki RMD jauh dari ideal, dan 27,6% program studi PPG di PTS memiliki RMD jauh dari ideal. Bagi LPTK yang memiliki RMD yang jauh dari ideal, agar diingatkan untuk segera berbenah jika ingin program studinya diperpanjang ijin operasionalnya.

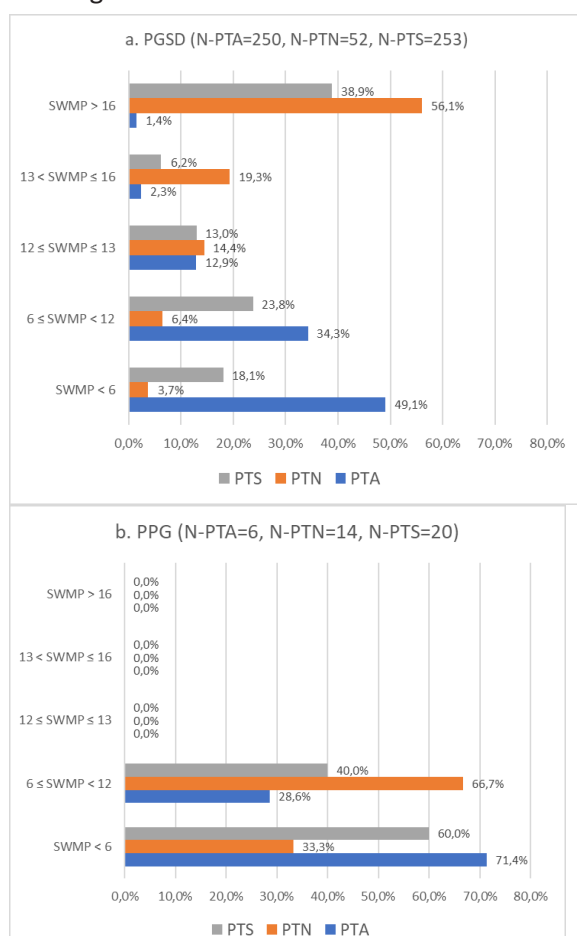
RMD yang jauh dari ideal menunjukkan bahwa perhatian dosen terhadap mahasiswanya sangat kurang, sehingga dapat berakibat pada rendahnya mutu lulusan LPTK. Selanjutnya, banyaknya LPTK yang memiliki RMD<25 menunjukkan bahwa LPTK memiliki kelebihan dosen, dan ini berakibat pada tingginya anggaran yang harus disiapkan oleh LPTK untuk membayar gaji dosen.

Indikator mutu keempat adalah beban kerja dosen. Dalam melakukan akreditasi beban kerja dosen diistilahkan dengan ekuivalensi atau Setara Waktu Mengajar Penuh (SWMP). SWMP ini mencakup kegiatan Pendidikan, Penelitian, Pengabdian kepada Masyarakat (PkM) dan tugas tambahan. Beban kerja dosen seyogyanya diatur

sedemikian agar mencapai ideal. Jika terlalu ringan, akan tidak efisien karena biaya untuk gaji terlalu besar, namun jika beban kerja terlalu berat juga tidak efektif, karena dosen bisa jatuh sakit karena mengalami kelelahan. BANPT dalam melakukan akreditasi menerapkan kriteria berikut terkait SWMP ini.

- SWMP < 6, dianggap terlalu ringan sehingga tidak efisien
- $6 \leq \text{SWMP} < 12$, dianggap cukup efisien
- $12 \leq \text{SWMP} \leq 13$, dianggap efisien
- $13 < \text{SWMP} \leq 18$, sudah mulai agak berat, namun masih bisa ditoleransi, masih cukup efisien
- SWMP > 18, sudah terlalu berat sehingga tidak efektif

Berdasarkan data Pangkalan data Dikti dilakukan kalkulasi terhadap beban kerja dosen dari seluruh program studi PGSD dan PPG. Hasilnya disajikan dalam grafik 7.



Grafik 7. Beban kerja DTSP

Dari grafik 7-a terlihat bahwa untuk program studi PGSD di PTA, beban kerja dosennya cenderung ringan dan hanya 12,9% memiliki beban kerja ideal yaitu $12 \leq \text{SWMP} \leq 13$, sedangkan sebanyak 49,1% memiliki beban kerja kurang dari 6 SWMP. Ini tentunya sangat disayangkan karena banyak biaya yang harus dikeluarkan untuk membayar gaji dosen sehingga tidak efisien. Sebaliknya untuk program studi PGSD di PTN, beban kerja dosennya cenderung berat, karena hanya 14,4% yang memiliki beban kerja ideal, sedangkan sisanya sebagian besar yaitu 56,1% memiliki beban kerja terlalu berat yaitu lebih besar dari 18 SWMP. Begitu juga dengan program studi PGSD di PTS. Beban kerja dosennya juga cenderung berat, karena hanya 13% dosennya memiliki beban kerja ideal. Sisanya 38,9% memiliki beban kerja jauh dari ideal yaitu lebih besar dari 18 SWMP. Beban kerja yang berat ini tentunya sangat disayangkan karena dapat menimbulkan kelelahan bagi dosen, sehingga dosen bisa jatuh sakit.

Selanjutnya pada grafik 7-b terlihat beban kerja dosen program studi PPG umumnya ringan karena tidak ada satu pun program studi PPG yang memiliki beban kerja ideal yaitu $12 \leq \text{SWMP} \leq 13$. Seluruh program studi PPG memiliki beban kerja kurang dari 12 SWMP. Berikut diuraikan secara detail beban kerja dosen program studi PPG di masing-masing PTA, PTN dan PTS. Untuk program studi PPG di PTA sebanyak 71,4% memiliki beban kerja ringan karena beban kerjanya kurang dari 6 SWMP, sisanya 28,6% memiliki beban kerja cukup ringan yaitu $6 \leq \text{SWMP} < 12$. Untuk program studi PPG di PTN sebanyak 33,3% memiliki beban kerja ringan karena beban kerjanya kurang dari 6 SWMP, sisanya 66,7% memiliki beban kerja cukup ringan yaitu $6 \leq \text{SWMP} < 12$. Untuk program studi PPG di PTS sebanyak 60% memiliki beban kerja ringan karena beban kerjanya kurang dari 6 SWMP, sisanya 40% memiliki beban kerja cukup ringan yaitu $6 \leq \text{SWMP} < 12$.

Hasil analisis terkait beban kerja dosen ini menunjukkan bahwa beban kerja dosen khususnya di seluruh program studi PPG dan sejumlah kecil PGSD cenderung ringan. Hal ini menunjukkan bahwa LPTK penyelenggara PPG dan sebagian penyelenggara PGSD memiliki kelebihan dosen. Hal ini tentunya sangat disayangkan karena akan tidak efisien. Ini karena banyak biaya dikeluarkan LPTK untuk membayar gaji dosen. Selanjutnya lebih dari separuh dosen pada program studi PGSD di PTN dan cukup

banyak dosen pada program studi PGSD di PTS dan sejumlah kecil dosen pada program studi PGSD di PTA memiliki beban kerja yang jauh dari ideal yaitu $SWMP > 16$. Beban kerja yang berat ini akan sangat berpengaruh pada perhatian dosen terhadap mahasiswa. Dosen tidak akan maksimal dalam memberikan perhatian kepada mahasiswa, sehingga dapat menimbulkan rendahnya mutu lulusan yang dihasilkan.

LPTK yang memiliki dosen tetap yang tidak memadai atau memiliki dosen tidak tetap yang melebihi standar yang ditetapkan atau memiliki rasio mahasiswa dosen yang tidak ideal, atau memiliki dosen dengan beban kerja yang cenderung berat berpotensi menghasilkan lulusan calon guru dengan mutu seadanya. Ketika lulusan dengan mutu seadanya ini terpaksa direkrut oleh satuan pendidikan karena kebutuhan yang mendesak, guru-guru ini berpotensi memberikan kinerja yang tidak maksimal, artinya hanya bisa menghasilkan peserta didik dengan prestasi seadanya.

Evaluasi Mutu Input Mahasiswa PGSD dan PPG

Input mahasiswa memainkan peranan penting dalam menentukan mutu lulusan LPTK. Untuk itu perlu dilakukan seleksi yang ketat terhadap calon mahasiswa agar diperoleh calon-calon guru yang unggul. Untuk mendapat gambaran tentang mutu input mahasiswa di LPTK, berikut ini disajikan hasil akreditasi BANPT khusus untuk beberapa item terkait upaya LPTK khususnya program studi PGSD untuk menjaring mahasiswa yang terbaik menjadi calon guru. Selain itu akan disajikan pula indikator mutu input mahasiswa lainnya yang diperoleh dari survei langsung dengan mahasiswa tingkat akhir dari program studi PGSD dan PPG.

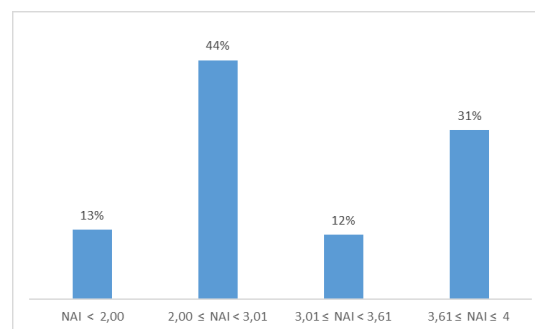
Indikator mutu input mahasiswa yang pertama adalah rasio jumlah pendaftar terhadap daya tampung pada LPTK penyelenggara PGSD. Dengan adanya program sertifikasi guru, LPTK menjadi pilihan favorit bagi banyak lulusan sekolah menengah. Untuk mengecek kebenaran dari informasi ini, BANPT melakukan akreditasi terhadap item rasio jumlah pendaftar terhadap daya tampung. Semakin banyak jumlah pendaftar, Nilai Akreditasi Item (NAI) semakin tinggi. Dalam memberikan nilai akreditasi untuk item ini, BANPT menerapkan kriteria berikut.

- Rasio ≥ 5 , animo lulusan sekolah menengah (SM)

amat tinggi untuk masuk PGSD ($3,61 \leq \text{NAI} \leq 4$)

- $4,4 \leq \text{Rasio} < 5$, animo lulusan SM tinggi untuk masuk PGSD ($3,01 \leq \text{NAI} < 3,61$)
- $3,8 \leq \text{Rasio} < 4,4$, animo lulusan SM cukup tinggi untuk masuk PGSD ($2 \leq \text{NAI} < 3,01$)
- Rasio $< 3,8$ dikatakan animo lulusan SM rendah untuk masuk PGSD ($\text{NAI} < 2$)

Berdasarkan data dari BANPT, nilai akreditasi yang diberikan BANPT kepada 109 LPTK penyelenggara PGSD disajikan dalam grafik 8.



Grafik 8. Rasio calon mahasiswa yang ikut seleksi terhadap daya tampung (N=109)

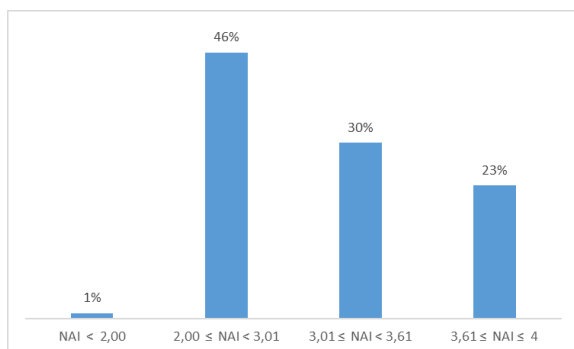
Dari grafik terlihat bahwa dari 109 program studi PGSD, sebanyak 31% LPTK memiliki rasio pendaftar terhadap daya tampung LPTK lebih besar dari 5, yaitu indikator yang menunjukkan bahwa antusiasme lulusan SM untuk masuk PGSD sangat tinggi. Selanjutnya, 12% LPTK memiliki rasio yang menunjukkan antusiasme lulusan SM untuk masuk PGSD tinggi, kemudian 44% LPTK memiliki rasio yang menunjukkan antusiasme lulusan SM untuk masuk PGSD cukup tinggi. Tercatat hanya 13% LPTK yang memiliki rasio yang menunjukkan antusiasme lulusan SM untuk masuk PGSD rendah. Uraian di atas ini menunjukkan bahwa antusiasme masyarakat untuk masuk PGSD dapat dikatakan tinggi pada sejumlah besar LPTK. Pada LPTK ini tentunya mutu input mahasiswa akan semakin baik jika LPTK dapat menjaring mahasiswa dengan nilai atau kualitas terbaik. Selanjutnya, pada sejumlah kecil LPTK yang animo masyarakat untuk masuk ke LPTK tersebut rendah, tentunya mutu input mahasiswanya kurang bagus sehingga LPTK tersebut berpotensi menghasilkan lulusan dengan mutu rendah.

Indikator mutu input mahasiswa yang kedua

adalah keberlanjutan program studi. Bagaimana pun keberadaan mahasiswa sangat krusial dalam menentukan eksistensi LPTK. Untuk itu LPTK harus terus berupaya untuk meningkatkan jumlah pendaftar setiap tahunnya, sehingga salah satu item akreditasi yang ditetapkan BANPT adalah “Keberlanjutan program studi”. Yang dinilai dalam item ini adalah adanya upaya yang dilakukan LPTK untuk meningkatkan daya tarik calon mahasiswa untuk mendaftar berikut bukti keberhasilannya. Kriteria yang digunakan BANPT dalam memberikan nilai item adalah:

- Pendaftar meningkat $\geq 10\%$, keberlanjutan program studi sangat menjanjikan/bagus ($3,61 \leq \text{NAI} \leq 4$)
- Pendaftar meningkat $< 10\%$, keberlanjutan program studi menjanjikan/bagus ($3,01 \leq \text{NAI} < 3,61$)
- Pendaftar tidak meningkat namun juga tidak menurun, keberlanjutan program studi cukup menjanjikan ($2 \leq \text{NAI} < 3,01$)
- Pendaftar menurun maka keberlanjutan program studi tidak menjanjikan ($\text{NAI} < 2$)

Berdasarkan data dari BANPT, nilai akreditasi yang diberikan BANPT kepada 109 LPTK penyelenggara PGSD disajikan dalam grafik 9.



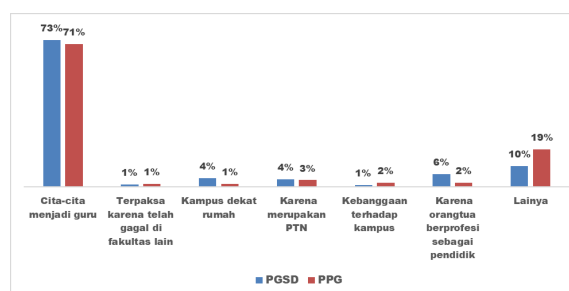
Grafik 9. Perkembangan pendaftar untuk masuk PGSD

Dari grafik terlihat bahwa LPTK terus berusaha meningkatkan jumlah pendaftar mahasiswa baru dan menyertakan bukti keberhasilan usahanya. Ini tentunya bagus untuk eksistensi LPTK. Semakin banyak pendaftar, semakin besar peluang LPTK untuk merekrut calon mahasiswa terbaik atau terunggul. Terlihat bahwa 23% LPTK mendapat nilai akreditasi yang sangat tinggi

untuk item ini artinya keberlanjutan program studi sangat menjanjikan/bagus. Selanjutnya tercatat 30% LPTK memperoleh nilai akreditasi yang tinggi untuk item ini, artinya bagi LPTK ini keberlanjutan program studi masih menjanjikan. Kemudian sebanyak 46% LPTK memperoleh nilai akreditasi cukup tinggi, artinya keberlanjutan program studi PGSD bagi LPTK ini masih cukup menjanjikan. Hanya 1% LPTK yang memperoleh nilai akreditasi yang rendah untuk item ini artinya keberlanjutan program studi PGSD pada LPTK ini kurang menjanjikan.

Meskipun hanya 1% LPTK yang keberlanjutan program studi PGSD-nya kurang menjanjikan, informasi ini menunjukkan bahwa jumlah pendaftar yang terus mengalami penurunan akan berakibat pada kecilnya peluang LPTK untuk merekrut input mahasiswa yang unggul. Dengan demikian maka LPTK seperti ini berpotensi menghasilkan lulusan calon guru dengan mutu yang rendah.

Indikator mengenai mutu input mahasiswa lainnya diperoleh langsung dari survei siswa. Terdapat dua indikator mutu input mahasiswa yang dikumpulkan langsung dari survei mahasiswa. Indikator yang pertama adalah animo mahasiswa masuk LPTK. Dalam beberapa tahun terakhir ini PGSD menjadi salah satu pilihan favorit lulusan sekolah menengah (SM). Hasil survei *online* alasan mahasiswa memilih masuk LPTK dapat dilihat pada grafik 10.



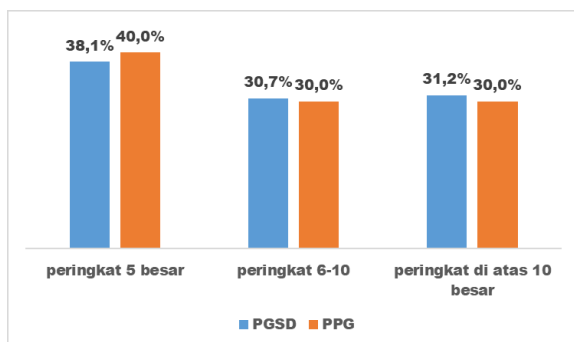
Grafik 10. Alasan-alasan Mahasiswa Memilih masuk LPTK (N1=349, N2=150)

Dari grafik 10 terlihat bahwa sebagian besar mahasiswa (73% PGSD dan 71% PPG) memilih masuk LPTK karena memang bercita-cita ingin menjadi guru. Informasi ini memberikan gambaran profesi guru memang merupakan profesi yang sangat menjanjikan, sehingga dapat menarik minat siswa SM. Ini menjadi dasar yang kuat karena LPTK dapat melakukan

seleksi untuk mendapat calon mahasiswa terunggul. Untuk program studi PGSD tercatat sekitar 27% mahasiswa dan untuk program studi PPG tercatat sekitar 29% mahasiswa yang menyatakan memilih masuk LPTK karena alasan lainnya seperti terpaksa karena telah gagal di fakultas lainnya, karena kampus dekat rumah, karena LPTK berstatus negeri, karena bangga dengan LPTK dan karena ikut profesi orang tua sebagai guru.

Terlihat masih cukup banyak mahasiswa memilih masuk LPTK bukan karena bercita-cita menjadi guru. Informasi ini tentunya cukup menguatkan bahwa mahasiswa ini ketika lulus nanti kurang bersemangat menjadi guru sehingga tidak total dalam memberikan pembelajaran kepada siswa. Lulusan seperti ini yang dapat berakibat pada rendahnya prestasi siswa jika mereka menjadi guru.

Indikator mengenai mutu input mahasiswa lainnya yang diperoleh langsung dari survei mahasiswa adalah peringkat mahasiswa tersebut ketika di Sekolah Menengah (SM) kelas XII. Informasi peringkat mahasiswa ketika masih belajar di sekolah menengah dapat memberikan gambaran tentang mutu input mahasiswa. Peringkat mahasiswa tersebut dapat dilihat pada grafik 11.



Grafik 11. Peringkat Mahasiswa Ketika Masih Belajar Di SM Kelas XII (N1=349, N2=150)

Dari grafik 11 terlihat bahwa dari 349 mahasiswa PGSD sebanyak 38,1% menyandang peringkat 5 besar di kelasnya ketika di SM dan sebanyak 30,7% memiliki peringkat 6-10 ketika di SM. Jadi untuk program studi PGSD tercatat kurang lebih 68,8% mahasiswa yang memiliki peringkat 10 besar ketika di SM. Selanjutnya dari 150 mahasiswa PPG, sebanyak 40% menduduki peringkat 5 besar di kelasnya ketika di SM dan

30% memiliki peringkat 6-10 ketika di SM. Jadi tercatat sekitar 70% mahasiswa PPG yang memiliki peringkat 10 besar ketika di SM.

Selama ini sering terdengar bahwa mereka yang memiliki peringkat bagus di SM umumnya memilih untuk kuliah di fakultas non kependidikan. Dari data dan informasi ini diperoleh gambaran bahwa mutu input mahasiswa cukup bagus, karena sebagian besar memiliki peringkat 10 besar ketika masih belajar di SM. Mutu input mahasiswa yang bagus ini diharapkan dapat meningkatkan mutu lulusan LPTK dan akhirnya dapat meningkatkan prestasi anak Indonesia.

Sayang masih cukup banyak mahasiswa LPTK yang peringkatnya di luar 10 besar ketika di SM, yaitu sekitar 31,2% mahasiswa PGSD dan sekitar 30% Mahasiswa PPG. Input mahasiswa seperti ini tentunya dapat menurunkan mutu lulusan LPTK. Untuk itu, LPTK harus lebih ketat dalam menjaring mahasiswa agar terseleksi lulusan SM yang benar-benar unggul dan memiliki cita-cita untuk mengajar.

Terkait mutu input mahasiswa, terlihat bahwa LPTK sudah bisa menjaring input mahasiswa pilihan karena adanya animo masyarakat yang begitu tinggi untuk masuk LPTK. Bahkan terlihat bahwa banyak mahasiswa yang masuk LPTK adalah mereka yang menduduki peringkat 5 besar ketika di SM. Namun tetap saja perlu dicermati dengan penuh kehati-hatian karena sampel mahasiswanya berasal dari LPTK kenamaan di wilayah Jakarta dan sekitarnya, di mana profesi guru memang sangat menggiurkan khususnya di Provinsi Daerah Khusus Ibukota (DKI) yang pendapatan gurunya cukup tinggi.

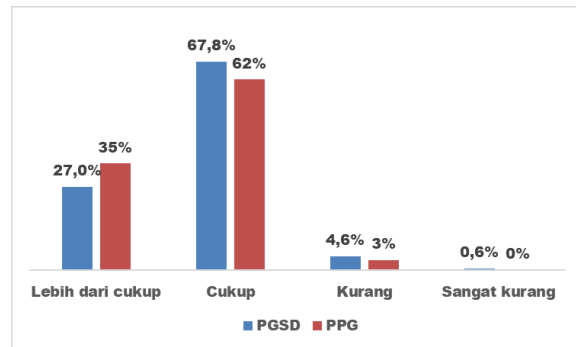
Terkait mutu input mahasiswa ini, tim kajian membandingkan dengan input mahasiswa di negara lain yang diseleksi untuk menjadi calon guru. Di Singapura misalnya, guru masuk ke dalam 5 peringkat teratas pekerjaan favorit karena memiliki persaingan ketat, sebagaimana disampaikan Widyawati (2019). Hal ini disebabkan proses penyeleksian profesi guru sangat ketat sehingga menghasilkan guru-guru yang terampil dan kreatif dalam melaksanakan tugasnya. Dalam panduan Easyuni (2019) diungkapkan bahwa guru-guru di Singapura merupakan tenaga pengajar yang berkualitas, karena mereka diseleksi dari murid terbaik saat di SM. Kasus di Singapura ini belum sepenuhnya terjadi di Indonesia, namun hasil kajian ini

memberikan harapan karena sebagian besar siswa terbaik di sekolah menengah sudah mulai tertarik untuk kuliah di LPTK.

Mutu input mahasiswa terlihat sudah sangat baik. Informasi ini tentu sangat menggembirakan dunia pendidikan Indonesia. Meningkatnya mutu input mahasiswa ini merupakan dampak dari kebijakan sertifikasi guru. Dengan adanya kebijakan tersebut, setiap guru yang memiliki sertifikat pendidik ketika memenuhi persyaratan mengajar akan menerima tunjangan profesi guru yang besarnya minimal sebesar satu kali gaji pokok. Kebijakan ini telah memotivasi lulusan terbaik sekolah menengah untuk masuk LPTK. Padahal sebelumnya lulusan terbaik sekolah menengah umumnya memilih masuk perguruan tinggi non LPTK. Kesempatan ini seharusnya dimanfaatkan betul oleh LPTK untuk menjaring mahasiswa terunggul untuk dididik menjadi guru. Lulusan calon guru yang dihasilkan dari mutu input yang unggul ini akan meningkatkan mutu LPTK. Ketika lulusan calon guru ini direkrut menjadi guru oleh satuan pendidikan, mereka sangat berpotensi menghasilkan peserta didik dengan prestasi yang tinggi.

Evaluasi Kurikulum Magang

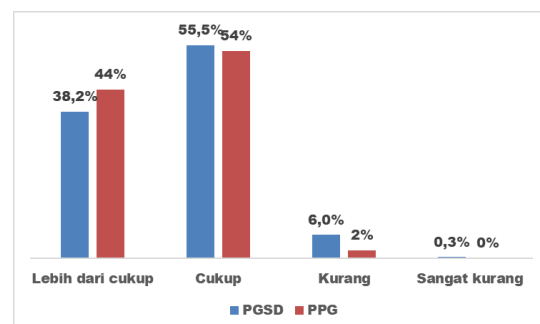
Kurikulum yang dikaji adalah khusus pelaksanaan magang yaitu PKM oleh mahasiswa PGSD dan PPL oleh mahasiswa PPG. Magang yang berkualitas akan meningkatkan kualitas lulusan LPTK. Berikut disajikan beberapa indikator yang dapat memberikan gambaran mengenai mutu magang mahasiswa LPTK. Pendapat tentang indikator mutu magang ini diperoleh melalui survei langsung dengan mahasiswa. Indikator mutu magang yang pertama adalah durasi magang. Berdasarkan hasil DKT, diperoleh informasi bahwa durasi magang untuk PGSD adalah 1 semester sedangkan untuk PPG hanya 2 minggu karena mereka umumnya mahasiswa yang sudah menjadi guru (guru dalam jabatan). Mahasiswa diminta pendapatnya tentang durasi magang, apakah durasi magang yang dialami sudah memadai dalam memberikan pengalaman mengajar kepada mereka. Grafik 12 menunjukkan pendapat mahasiswa mengenai durasi magang ini.



Grafik 12. Pendapat tentang durasi PKM/PPL (N1=348, N2=150)

Dari grafik 12 dapat dilihat bahwa sekitar 94,8% mahasiswa PGSD dan 97% mahasiswa PPG berpendapat bahwa durasi magang yang dialaminya sudah cukup atau lebih dari cukup memadai dalam memberikan pengalaman mengajar kepada mereka. Tercatat sekitar 5,2% mahasiswa PGSD dan 3% mahasiswa PPG yang memberikan pendapat bahwa durasi magang yang dialaminya kurang memadai dalam memberikan pengalaman mengajar kepada mereka. Meskipun persentasenya kecil, namun durasi magang yang dianggap kurang memadai ini dapat menurunkan mutu lulusan calon guru.

Indikator mutu magang yang kedua adalah ketercukupan pengalaman mengajar yang diperoleh ketika melakukan magang. Sebagaimana diketahui, tujuan magang adalah agar mahasiswa dapat belajar praktik mengajar secara nyata dan langsung di kelas sehingga mendapat pengalaman dan kemampuan memadai untuk menjadi guru. Pendapat mahasiswa tentang ketercukupan memperoleh pengalaman mengajar ini disajikan dalam grafik 13.

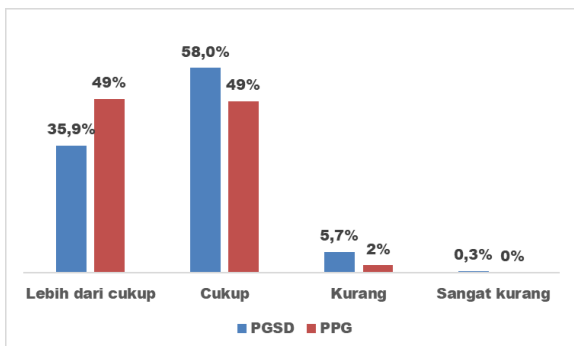


Grafik 13. Pendapat tentang pengalaman

mengajar yang diperoleh (N1=348, N2=150)

Dari grafik 13 terlihat sekitar 93,7% mahasiswa PGSD dan sekitar 98% mahasiswa PPG berpendapat bahwa mereka cukup atau lebih dari cukup mendapat pengalaman mengajar yang memadai untuk kelak menjadi guru setelah lulus. Tercatat sekitar 6,3% mahasiswa PGSD dan 2% mahasiswa PPG yang berpendapat bahwa mereka masih kurang mendapat pengalaman mengajar yang memadai. Meskipun angka ini kecil namun mahasiswa-mahasiswa yang kurang mendapat pengalaman mengajar yang memadai ini dapat mengurangi mutu lulusan LPTK.

Indikator mutu magang yang ketiga adalah kualitas bimbingan oleh dosen pembimbing selama magang. Dosen pembimbing magang harus terus memantau dan mengawasi serta membimbing mahasiswanya di dalam pelaksanaan magang. Perhatian dan pemantauan dari dosen pembimbing akan dapat menyemangati mahasiswa yang sedang magang untuk melaksanakan magang dengan baik dan bersungguh-sungguh. Grafik 14 menunjukkan pendapat mahasiswa tentang kualitas bimbingan dosen pembimbing selama magang.

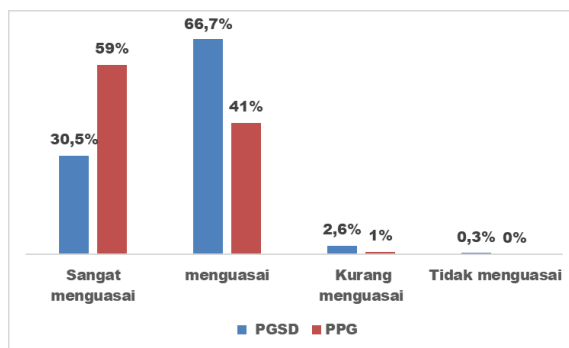


Grafik 14. Pendapat tentang kualitas bimbingan dosen pembimbing (N1=348, N2=150)

Dari grafik 14 terlihat bahwa sebanyak 94% mahasiswa PGSD dan 98% mahasiswa PPG berpendapat mereka sudah cukup hingga lebih dari cukup mendapat pembimbingan dan pengawasan oleh dosen pembimbing selama magang. Hanya 6% mahasiswa PGSD dan 2% mahasiswa PPG yang berpendapat bahwa mereka masih kurang mendapat pembimbingan yang memadai dari dosen pembimbing selama magang. Meskipun angka ini kecil namun informasi ini tentunya memberikan gambaran

kurangnya perhatian dosen pembimbing magang sehingga dapat menimbulkan rendahnya mutu lulusan LPTK.

Indikator mutu magang yang keempat adalah penguasaan dosen pembimbing terhadap pembelajaran. Mahasiswa magang akan mendapat pengalaman mengajar yang memadai jika mendapat bimbingan dari dosen pembimbing magang yang kompeten yaitu menguasai substansi dan memiliki kompetensi pedagogi yang memadai. Grafik 15 menyajikan pendapat mahasiswa magang tentang kompetensi profesional dan pedagogis dari dosen pembimbing magang.

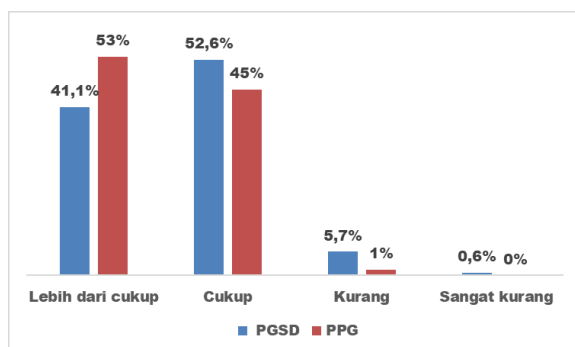


Grafik 15. Pendapat mahasiswa tentang kompetensi profesional dan pedagogis dosen pembimbing magang (N1=348, N2=150)

Dari grafik 15 terlihat bahwa sebanyak 97,1% mahasiswa PGSD dan 99% mahasiswa PPG berpendapat bahwa dosen pembimbing magang menguasai, bahkan sangat menguasai substansi dan memiliki kompetensi pedagogis yang memadai. Jadi, tercatat hanya 2,9% mahasiswa PGSD dan 1% mahasiswa PPG yang berpendapat bahwa dosen pembimbing mereka kurang menguasai substansi pembelajaran dan kurang memiliki kompetensi pedagogis. Angka ini kecil namun perlu mendapat perhatian dari LPTK, karena dosen pembimbing magang yang kurang menguasai kompetensi profesional dan pedagogis akan dapat menyebabkan rendahnya mutu lulusan LPTK.

Indikator mutu magang yang kelima adalah mutu bimbingan oleh guru pamong. Guru pamong adalah guru yang secara rutin setiap hari membimbing dan mengarahkan mahasiswa magang agar secara maksimal

dapat memperoleh pengalaman mengajar yang memadai, sehingga kelak siap untuk menjadi guru. Grafik 16 menyajikan pendapat mahasiswa tentang kualitas bimbingan guru pamong.



Grafik 16. Pendapat tentang kualitas bimbingan oleh guru pamong (N1=348, N2=150)

Dari grafik terlihat sebanyak 93,7% mahasiswa PGSD dan 99% mahasiswa PPG berpendapat bahwa kualitas guru pamong yang membimbingnya selama magang cukup bahkan lebih dari cukup memadai. Jadi hanya 6,3% mahasiswa PGSD dan 1% mahasiswa PPG yang berpendapat bahwa kualitas bimbingan guru pamong kurang memadai. Angka ini kecil namun harus menjadi perhatian LPTK karena guru pamong yang kurang berkualitas dalam memberikan bimbingan dapat menyebabkan rendahnya mutu lulusan LPTK.

Dari uraian di atas terlihat bahwa indikator penentu mutu magang sebenarnya sudah sangat memadai dengan dukungan sumber daya yang ada, namun mungkin perlu ada perubahan atau perbaikan di sana sini karena ada sebagian kecil mahasiswa merasa masih belum cukup mendapat apa yang diharapkan dari pelaksanaan magang. Namun demikian, perlu dicermati dengan kehati-hatian karena sampel mahasiswanya hanyalah mahasiswa dari wilayah Jakarta dan sekitarnya, sehingga pendapat mahasiswa ini tidak dapat berlaku secara nasional.

Terkait program magang, tim kajian mencoba membandingkan dengan program magang mahasiswa di India. Model magang untuk pendidikan guru di India melibatkan orientasi teoritis singkat diikuti dengan periode tiga sampai lima bulan mengajar di sekolah dan diawasi oleh dosen pembimbing dengan penekanannya lebih pada praktik reflektif berdasarkan perspektif pada peserta didik dan konteksnya. Lama waktu

magang empat hari seminggu untuk jangka waktu minimal 12 minggu dan maksimal 20 minggu, termasuk satu minggu dengan supervisi penuh dari dosen pembimbing (Chennat, 2014). Yang terakhir ini merupakan sebuah praktik baik yang dapat diadopsi dan diterapkan di Indonesia yaitu satu minggu supervisi penuh oleh dosen pembimbing.

Magang mahasiswa calon guru merupakan salah satu fase yang sangat penting bagi mahasiswa LPTK untuk mengenal dunia kerja nyata. Mahasiswa calon guru akan mendapat pengalaman nyata sehingga ketika tiba saatnya dia menjadi guru, dia menjadi tidak canggung mengajar dan siap berdiri di depan kelas menjadi guru. Dari informasi tentang magang terlihat bahwa magang umumnya telah dilaksanakan dengan baik. Pelaksanaan magang yang sudah baik ini perlu terus dipertahankan atau ditingkatkan. Dengan persiapan dan perencanaan magang yang baik dari LPTK dan sekolah mitra, lalu diikuti dengan pelaksanaan magang dengan bimbingan dan pengawasan memadai dari guru pamong niscaya mutu magang akan meningkat. Apalagi ada periode selama magang di mana mahasiswa mendapat bimbingan secara intensif oleh dosen pembimbing magang. Hal ini menimbulkan potensi hasil magangnya sangat memuaskan. Magang yang terencana dan dikelola dengan baik ini akan meningkatkan mutu lulusan LPTK. Sama seperti disampaikan sebelumnya, ketika lulusan LPTK ini direkrut menjadi guru, mereka akan sangat berpotensi memberikan kinerja yang baik yaitu menghasilkan peserta didik dengan prestasi yang tinggi.

SIMPULAN DAN OPSI KEBIJAKAN

Simpulan

Sistem penyiapan guru untuk mengajar pada jenjang pendidikan dasar sudah didesain untuk menghasilkan guru profesional namun implementasinya masih menemukan banyak kendala. Ini karena rekrutmen guru yang kurang terkontrol. Seharusnya sudah saatnya guru yang direkrut untuk mengajar harus sudah bersertifikat pendidik. Namun kenyataannya masih saja ada banyak guru yang mengajar tanpa memiliki sertifikat pendidik, terbukti dari sebagian besar mahasiswa program studi PPG merupakan guru dalam jabatan.

Terkait mutu LPTK, selama ini informasi mengenai

mutu LPTK atau program studi diketahui dari status akreditasinya. Namun, penelitian menunjukkan masih ada banyak program studi yang belum mengantongi sertifikat akreditasi, sehingga LPTK menyelenggarakan program studi tersebut baru berdasarkan ijin operasional dari Kemendikbud. Banyak pula program studi yang sudah terakreditasi namun sebagian besar memiliki status akreditasi C.

Beberapa kesimpulan mengenai pemenuhan LPTK terhadap SNP terkait dosen dijabarkan sebagai berikut: (i) Secara kuantitas dan kualitas LPTK umumnya sudah memenuhi tuntutan SNP yang ditetapkan seperti minimal memiliki 5 DTSP S2. Masih ada satu atau dua LPTK yang belum memenuhi tuntutan standar ini. Selain itu masih ada sejumlah kecil LPTK, khususnya PTS yang memiliki dosen tidak tetap (DTT) yang jumlahnya melebihi ketentuan dari standar yang ditetapkan; (ii) Terkait Rasio Mahasiswa Dosen (RMD): RMD program studi PGSD umumnya sudah sesuai standar yang ditetapkan, hanya saja masih ada sejumlah kecil yang memiliki RMD tidak sesuai standar yang ditetapkan yaitu $RMD > 50$. RMD di program studi PPG cukup mengkhawatirkan karena cukup banyak LPTK yang memiliki $RMD > 50$; (iii) Terkait beban kerja, untuk program studi PGSD: beban kerja dosen di PTN dan PTS umumnya cenderung berat, sedangkan di PTA cenderung ringan, karena banyak LPTK yang beban kerja dosennya kurang dari 6 SWMP. Untuk PPG, beban kerja dosen PPG baik di PTA, PTS dan PTN cenderung ringan. Hal ini dapat mengakibatkan terjadi inefisiensi karena banyak biaya dikeluarkan untuk membayar gaji dosen.

Kesimpulan terkait mutu input mahasiswa dijabarkan sebagai berikut: (i) Untuk program studi PGSD: animo untuk masuk LPTK sudah sangat tinggi terbukti dari tingginya jumlah lulusan SM yang mendaftar masuk LPTK, khususnya program studi PGSD, dengan demikian LPTK dengan leluasa dapat melakukan seleksi yang ketat untuk mendapat calon mahasiswa yang benar-benar unggul untuk menjadi guru. Yang cukup menggembirakan adalah bahwa banyak mahasiswa yang memiliki peringkat 5 besar ketika di SM yang memilih masuk LPTK. Selain itu hal lain yang cukup menggembirakan adalah bahwa sebagian besar mahasiswa yang masuk LPTK memang punya cita-cita untuk menjadi guru. Dengan demikian input mahasiswa yang masuk LPTK merupakan

mahasiswa-mahasiswa dengan mutu terbaik. Jadi meskipun lambat namun pasti input mahasiswa LPTK terus mengarah pada tren yang ada di Singapura di mana mahasiswa LPTK-nya umumnya merupakan mahasiswa yang tadinya adalah siswa-siswa terbaik di SM; (ii) Untuk program studi PPG: mahasiswa tidak diseleksi sendiri oleh LPTK tapi diseleksi oleh Ditjen GTK di antara guru dalam jabatan yang belum memiliki sertifikat pendidik.

Bagian kurikulum yang dikaji dalam penelitian ini hanyalah yang terkait dengan magang yaitu PKM dan PPL. Selama ini, lama PKM mahasiswa PGSD adalah satu semester, sedangkan lama PPL untuk mahasiswa PPG adalah dua minggu. Durasi magang ini dianggap cukup oleh mahasiswa. Pada umumnya mahasiswa merasa dalam kurun waktu tersebut mendapat pengalaman yang cukup memadai untuk menjadi guru karena mendapat bimbingan dari dosen pembimbing dan juga dari guru pamong. Terkait magang, pendidikan guru di India mendapat sorotan internasional karena sistem magangnya. Durasi magang di India sudah kurang lebih sama dengan di Indonesia, namun di India selama satu minggu penuh mahasiswa magang melakukan praktik mengajar dengan mendapat pengawasan penuh dari dosen pembimbing.

Opsis Kebijakan

Bagi Pemerintah Pusat: sudah saatnya sistem pendidikan keguruan secara ketat mengimplementasikan regulasi yang dibuat untuk meningkatkan mutu pendidikan secara umum. Dalam undang-undang disebutkan bahwa rekrutmen guru harus menyeleksi calon di antara mereka yang sudah memiliki sertifikat pendidik. Selama ini undang-undang ini dilanggar dan tidak ada sanksi yang tegas. Banyak guru yang direkrut tidak memiliki sertifikat pendidik, sehingga ketika mereka sudah menjadi guru membebani anggaran pemerintah karena harus dididik dan dilatih di program studi PPG untuk mendapat sertifikat pendidik. Jadi sebaiknya rekrutmen guru mempertimbangkan tuntutan undang-undang bahwa yang menekankan untuk hanya menerima lulusan program studi PPG. Perlu dilakukan sosialisasi secara masif bahwa seseorang yang ingin berprofesi sebagai guru, setelah lulus sarjana pendidikan harus ikut program PPG terlebih dahulu.

Program studi yang diselenggarakan LPTK dengan dasar ijin operasional dari Kemendikbud agar didorong untuk secepatnya mengajukan usul untuk diakreditasi. LPTK ini agar diberi kesempatan misalnya 1 tahun untuk melakukan pengajuan akreditasi, apabila dalam waktu yang ditetapkan masih belum juga mengajukan pelaksanaan akreditasi, sebaiknya program studi tersebut tidak diberikan lagi ijin penyelenggaraannya. Demikian pula halnya dengan program studi yang terakreditasi C, agar diberi kesempatan misalnya selama 4 tahun untuk meningkatkan status akreditasinya, dan apabila dalam waktu yang diberikan tidak mampu meningkatkan akreditasinya, sebaiknya ijin penyelenggaraannya dihentikan.

Terkait pemenuhan standar dosen: (i) LPTK yang masih memiliki dosen tetap yang tidak memenuhi standar untuk kuantitas dan kualitas agar diberi waktu misalnya 1 tahun untuk memenuhi standar yang ditetapkan, apabila dalam waktu yang ditetapkan tidak juga memenuhi standar tersebut maka sebaiknya program studi tersebut dicabut ijin operasionalnya; (ii) LPTK dengan RMD lebih besar dari 50 agar diberi waktu untuk membenahi manajemen perencanaannya khususnya dalam hal seleksi penerimaan mahasiswa baru agar di satu sisi sesuai dengan daya tampung tetapi di sisi lain harus tetap menyesuaikan pula dengan jumlah dosennya. Jangan sampai mengejar keuntungan sebesar-besarnya namun hanya mampu menciptakan pengangguran intelektual atau menghasilkan calon guru dengan mutu seadanya; (iii) LPTK harus dapat menjelaskan bahwa beban dosen yang terlalu ringan hanya akan membebani anggaran LPTK, karena biaya rutinnya terlalu tinggi jika ada banyak dosen yang beban kerjanya kurang dari 6 SWMP. Untuk itu perlu dibuatkan kesepakatan ketika rekrutmen dosen bahwa jika kelak beban kerjanya tidak memadai maka bersedia untuk dipotong gajinya, atau dilakukan pemutusan hubungan kerja (PHK).

Terkait peningkatan mutu input Mahasiswa: animo lulusan sekolah menengah untuk masuk LPTK sudah sangat tinggi. Ini tentunya informasi yang baik sekali karena LPTK dapat menjaring mereka yang unggul dalam prestasi akademis untuk menjadi calon guru. Namun, seleksi masuk dengan tes tertulis perlu dikombinasikan dengan tes wawancara untuk menjaring mereka yang benar-benar mencintai profesi guru untuk diterima menjadi mahasiswa calon guru. Seperti

di Singapura yang menyeleksi siswa-siswa terbaik di sekolah menengah untuk menjadi calon guru; Ditjen GTK dapat melakukannya dengan mempromosikan profesi guru di sekolah menengah dengan menawarkan program beasiswa agar siswa-siswa terbaik di sekolah menengah mau dan bersedia dididik untuk menjadi guru.

Terkait kurikulum, khususnya peningkatan mutu magang: praktik baik terkait magang yang dilakukan di India sebaiknya dapat diadopsi dan disesuaikan dengan kondisi di Indonesia untuk diterapkan yaitu bimbingan dan pengawasan yang intensif selama seminggu oleh dosen pembimbing selama mahasiswa mengikuti magang.

PUSTAKA ACUAN

- Achadah, A. (2019). *Evaluasi Dalam Pendidikan Sebagai Alat Ukur Hasil Belajar*. Jurnal An-Nuha Universitas Islam Raden Rahmat Malang Volume 6, No. 1, 91-107
- Adi, A. (2016). *Analisis Penyebab Tingginya Pengangguran Sarjana Di Kecamatan Simeulue Barat Kabupaten Simeulue*. Skripsi. Meulaboh Aceh Barat: Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik, program Studi Ilmu Sosiologi, Universitas Teuku Umar
- Bhakti, C.P. dan Maryani I. (2016). *Peran LPTK dalam Pengembangan Kompetensi Pedagogik Calon Guru*. Jurnal Pendidikan, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Ahmad Dahlan, Volume 1, No. 2, 98-106
- Chennat, S. (2014). *Internship in Pre-Service Teacher Education programme: A Global Perspective*. IMPACT: International Journal of Research in Applied, Natural and Social Sciences (IMPACT: IJRANSS) Volume 2, Issue 11, 79-94
- Dalyono, B. dan Agustina, D.A. (2016). *Guru Profesional Sebagai Faktor Penentu Pendidikan Bermutu*. Majalah Bangun Rekaprima FKIP-UT UPBJJ Semarang, 13-22
- Easyuni. (2019). Panduan Kuliah Pendidikan dan Keguruan di Singapura, dalam <https://www.easyuni.co.id/singapore-education-and-teaching>, diakses pada Maret 2020

- Muhson, A., Wahyuni, D., Supriyanto, & Mulyani, E. (2012). *Analisis Relevansi Lulusan Perguruan Tinggi Dengan Dunia Kerja*. Jurnal *Economia Universitas Negeri Yogyakarta*, Volume 8, No. 1, 42-52
- Munthe, A. P. (2015). *Pentingnya Evaluasi program Di Institusi Pendidikan: Sebuah Pengantar, Pengertian, Tujuan dan Manfaat*. Jurnal *Scholaria*, Fakultas Ilmu Pendidikan - Universitas Pelita Harapan-Tangerang Volume 5, No. 2, 1 – 14
- Pangestika, R.R. dan Alfarisa, F. (2015). Pendidikan Profesi Guru (PPG): *Strategi Pengembangan Profesionalitas Guru Dan Peningkatan Mutu Pendidikan Indonesia*. Prosiding Seminar Nasional 9 Mei 2015, 671-683
- Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 4 Tahun 2017 tentang Kebijakan Penyusunan Instrumen Akreditasi
- Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia No. 87 Tahun 2013 tentang program Pendidikan Profesi Guru Prajabatan
- Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia No. 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi
- Shobri, M. (2017). *Strategi Meningkatkan Mutu Pendidikan Di Madrasah Aliyah Hasan Jufri*. Cendekia: Jurnal Studi Keislaman STAI Hasan Jufri Bawean, Volume 3, No. 1, 11-26
- Sidik, F. (2016). *Guru Berkualitas Untuk Sumber Daya Manusia Berkualitas*. TADBIR : Jurnal Manajemen Pendidikan Islam, Institut Agama Islam Negeri Sultan Amai Gorontalo, Volume 4, No. 2, 109-114
- Samsu. (2017). *Manajemen Lembaga Pendidikan Tenaga Kependidikan Berbasis Kebutuhan Pasar Kerja*. Jurnal *Nur El-Islam Universitas Islam Negeri Sulthan Thaha Saifuddin Jambi*, Volume 4, No. 2, 29-48
- Suarga. (2019). *Hakikat, Tujuan Dan Fungsi Evaluasi Dalam Pengembangan Pembelajaran*. Jurnal *UIN-Alaudin Makassar Fakultas Tarbiyah dan Keguruan*, Volume VIII, No. 2, 327-338
- Sudarmi, N.M.S., Sarmita, I.M. dan Nugraha, A.S.A. (2020). *Tipe Pengangguran Terdidik: Antara Setengah Menganggur dan Terselubung pada Alumni program studi Pendidikan Geografi Undiksha Tahun 2017-2019*. Jurnal *Pendidikan Geografi Undiksha* Volume 8, No. 3, 119-129
- Syahril, I. (2018). *Guru dan Pendidikan Guru di Indonesia dari Zaman ke Zaman*, dalam https://www.slideshare.net/iwan_syahril09/sejarah-guru-dan-pendidikan-guru-di-indonesia-dari-zaman-ke-zaman-118398129. Diakses pada 10 Desember 2019
- Widiarto, A. (2020). *Analisis Kebijakan Pengelolaan Guru di Indonesia. Aspirasi: Jurnal Masalah-Masalah Sosial, Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi Banten* Volume 11, No. 1, 89-103
- Widyawati, T. (2019). *Singapura Menjadi Pendidikan Terbaik di Dunia, Guru Sebagai Kunci Kualitas Pendidikan*, dalam <http://www.rmoljateng.com/read/2019/07/10/20416/Singapura-Menjadi-Pendidikan-Terbaik-di-Dunia,-Guru-Sebagai-Kunci-Kualitas-Pendidikan-diakses-pada-10-Maret-2020>

